



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN DAN PARIWISATA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dida Gardera

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak kedua,

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian


Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata


Dida Gardera

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan yang Berkualitas	1.1	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	6%
		1.2	Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional	100%
2.	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	2.1	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	3,45% – 3,66%
		2.2	Indeks Efektivitas Stimulus Ekonomi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi	3 dari 4
3.	Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	3.1	Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	6 KSEP dari 6 KSEP
		3.2	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	83%
4.	Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	4.1	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	10.01%
		4.2	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	USD 1.400 - 1.479
		4.3	Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF	80%
5.	Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	5.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	3 dari 4
6.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	6.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4
7.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	7.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	92%

Kegiatan

1. Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
2. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
5. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
6. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Anggaran

Rp 2.247.905.000,-
Rp 2.011.355.000,-
Rp 2.033.856.000,-
Rp 10.852.502.000,-
Rp 1.923.016.000,-
Rp 2.071.242.000,-

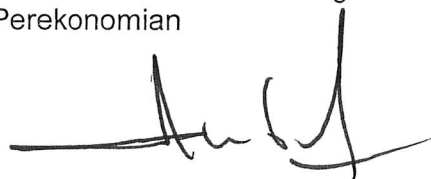
Total

(Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Rp. 21.139.876.000,-*

Pihak kedua,

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airangga Hartarto

Pihak Pertama,

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata



Dida Gardera